

Peranan Kelas Menengah Pribumi Dalam Mengentaskan Kesulitan Ekonomi Tahun 1930-an

I Gede Wayan Wisnuwardana
Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali
igedewayanwisnuwardana@gmail.com

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi pada awal abad ke-20 di beberapa wilayah Hindia Belanda. Fenomena tersebut adalah munculnya golongan pengusaha menengah yang terkait industrialisasi, munculnya golongan intelektual baru yang terkait dengan semakin diperluasnya kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan Barat, dan adanya perubahan struktur ekonomi dengan melamahnya sektor formal yaitu perkebunan dan menguatnya sektor non formal, dan munculnya industri manufaktur yang terkait dengan hantaman depresi ekonomi tahun 1930-an. Penting untuk ditegaskan bahwa golongan menengah baik dari kalangan pengusaha maupun intelektual dapat disebut sebagai pahlawan bagi masyarakat pribumi secara umum. Merekalah yang banyak berjasa untuk meringankan penderitaan rakyat baik akibat adanya penjajahan secara umum maupun dari kesengsaraan akibat depresi tahun 1930-an.

Kata Kunci : Depresi Ekonomi, Kelas Menengah Pribumi

A. Pendahuluan

Berdasarkan catatan sejarah diketahui bahwa wilayah Hindia Belanda (Indonesia) pada era awal abad ke-20 erat kaitannya dengan kaum pergerakan akibat munculnya golongan pengusaha dan golongan intelektual di kalangan kaum pribumi. Kemunculan kedua golongan tersebut memang tidak dapat dipisahkan, dan merekalah yang memotori pergerakan. Sementara itu, timbulnya pergerakan di kalangan mereka secara umum sebenarnya merupakan akumulasi dari jawaban atas kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang telah lama tidak pernah memihak pada kaum pribumi.

Pada permulaan abad ini, telah timbul suatu rasa kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang terbelakang sebagai hasil dari kolonialisme. Perlakuan diskriminatif, telah menyadarkan rakyat dan khususnya bagi kedua golongan tersebut atas keadaan yang terjajah ini. Perlu dicatat bahwa pergerakan itu sendiri tampaknya memang merupakan sifat dasar dari

golongan intelektual yang tengah muncul tersebut. Mereka adalah sosok yang tidak pernah tenang, selalu gelisah ketika melihat kenyataan, dan selalu mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada saat tertentu, yang kemudian diproyeksikan pada kebenaran yang lebih tinggi.

Kepentingan yang paling dijunjung tinggi oleh mereka adalah tidak lebih demi tegaknya nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Golongan intelektual yang tengah muncul ini yang pasti adalah manusia yang telah tercerahkan dan dengan kekayaan rohani yang dimilikinya, mereka melakukan proses transformasi budaya, sehingga kebenaran hakiki bisa tegak di atas bumi. Itulah karakter yang terdapat pada golongan menengah atau golongan intelektual pada era ini.

Pergerakan mereka dilandasi oleh keresahan atas kondisi yang ada, yaitu kondisi di mana kehidupan kaum pribumi yang terbelakang dalam berbagai hal, setatus yang rendah bila dibandingkan dengan golongan Eropa, terjadi diskriminasi antara

pribumi dan Belanda, dan sebagainya. Oleh karena itu, wajar apabila kondisi semacam ini mendorong kedua golongan tersebut untuk mengadakan gerakan dengan tujuan ingin mencapai kemajuan, mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan menuntut pendidikan, dan pendeknya ide mengemansipasikan diri.¹

Pada awal abad ke-20 ini, baik golongan menengah atau golongan intelektual adalah kaum yang telah mempunyai, meminjam konsepnya Durkheim, “kesadaran organik”. Solidaritas yang mereka bangun telah berubah dari mekanis ke organik, yaitu solidaritas yang menunjuk kepada keterpaduan dalam organisme, yang berdasarkan keanekaragaman fungsi-fungsi demi kepentingan keseluruhan. Dalam masyarakat ini, hubungan-hubungan

sosial baru terbentuk atas pembagian kerja.²

Kemudian, yang perlu mendapat catatan adalah bahwa perjuangan kedua golongan tersebut tidaklah surut sampai tahun 1930-an ketika depresi ekonomi datang, dan bahkan sampai negeri ini merdeka. Diketahui bahwa dampak depresi ekonomi tahun 1930 sangat serius dan menyengsarakan rakyat pada umumnya.

B. Kondisi Umum Hindia Belanda Tahun 1930-an

Pada tahun 1930-an, dilaporkan banyak masyarakat Hindia Belanda yang harus kehilangan pekerjaannya, terutama para pekerja perkebunan. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia yang pada masa sebelum tahun 1930 bukan termasuk negara industri, karena hampir tidak menghasilkan barang industri, tetapi seluruhnya adalah bahan primer terutama dari bidang pertanian atau perkebunan

1 Sartono Kartodirdjo. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: Gramedia. Hlm. 100.

2 L. Laeyendecker. 1991. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Terj. Samekto S. S. Jakarta : Gramedia. Hlm. 291.

seperti bahan makanan yaitu gula, teh, padi, atau beras, kopi, dan bahan baku, seperti karet dan minyak tanah. Dengan struktur ekonomi yang semacam itu tentu saja mengakibatkan Indonesia sangat terpukul, karena pada masa depresi ekonomi tahun 1930-an diketahui perdagangan internasional mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Indonesia yang produksinya amat berat sebelah ke arah penghasilan bahan-bahan mentah, mudah sekali diombang-ambingkan oleh konjungtur dunia.³

Dalam kondisi yang semacam ini, tentu saja rakyat tidak dapat berharap banyak kepada pemerintah (Belanda) untuk mengentaskan kesengsaraan. Bahkan sebaliknya, tindakan pemerintah Hindia Belanda hanya menambah kesengsaraan rakyat pribumi dengan kebijakan-kebijakannya. Bagi rakyat zaman ini sering disebut dengan zaman meleset (dari *malaise*), yang berarti pengurangan kesempatan kerja,

pemotongan gaji, turunya harga-harga hasil pertanian, rendahnya upah, dan kenaikan pajak. Kesemuanya itu merupakan akibat dari politik (kebijakan) ekonomi yang pada satu pihak menjalankan penghematan besar-besaran dan di pihak lain hendak mempertahankan pendapatan ekspor terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan.⁴ Sementara itu, harapan rakyat satu-satunya hanyalah kepada perjuangan kaum pergerakan. Kaum inilah yang nantinya banyak menolong kesengsaraan rakyat pada masa depresi ekonomi ini. Sartono menyebutkan bahwa ada pelbagai usaha untuk menyesuaikan diri dari pihak gerakan nasionalis, antara lain dengan menjalankan politik kooperasi serta gerakan yang bersifat progresif-moderat,⁵ sedangkan dalam bidang ekonomi banyak dilakukan dengan mendirikan bentuk usaha koperasi.

C. Kelas Menengah Pribumi

4 Sartono Kartodirdjo. *Op. cit.* Hlm. 179.

5 *Ibid.* Hlm. 180.

3 D. H. Burger. 1960. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Terj. Atmosudirdjo. Jakarta: Pradnya Pramita. Hlm. 190.

Berbicara mengenai kelas atau golongan menengah pribumi awal abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda tentu saja tidak terlepas dari pembicaraan golongan intelektual baru (kaum terpelajar atau *priyayi* profesional) dan golongan pengusaha, karena dapat dikatakan bahwa kedua golongan itu muncul hampir bersamaan.⁶ Jadi, kemunculan kedua golongan tersebut merupakan fenomena awal abad ke-20. Sebagaimana disebutkan bahwa pada awal abad ke-20 di kebanyakan kota Hindia (Indonesia) telah terjadi kebangkitan golongan burjois pribumi. Kelas baru ini berasal dari kaum pengusaha dan cendekiawan

6 Menurut Kroef, bahwa munculnya kaum intelektual di kota-kota Indonesia pada abad XX ini hampir bersamaan dengan pedagang kelas menengah yang berkecimpung dalam industri manufaktur dan usaha pertokoan. Sementara itu, baik kelas menengah maupun golongan intelektual telah membawa konsep-konsep baru dalam masyarakat, lihat J.M. Van Der Kroef. 1954. *Indonesia in The Modern World*. Bandung: Masa Baru. Hlm. 151.

yang menguasai cakrawala kehidupan kota.⁷

Perlu ditegaskan bahwa di sini yang kemudian dapat disebut sebagai golongan menengah pribumi dari kalangan pengusaha adalah mereka yang tengah mengalami keberhasilan dalam usahanya, sehingga secara ekonomi mereka menempati posisi menengah. Dengan demikian, ukuran menengah di sini dihubungkan dengan kedudukan mereka dalam masyarakat yang dimanifestasikan dengan tingkat kesejahteraan sosialnya.⁸

Selanjutnya, yang masuk dalam kategori golongan intelektual baru adalah bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan model Barat. Tidak berbeda dengan golongan pengusaha, golongan intelektual ini juga dapat dimasukkan ke dalam kelas menengah baik ditinjau dari posisi maupun tingkat kesejahteraan

7 Kuntowijoyo. 1985. "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950. *Prisma* 11. Hlm. 35.

8Lihat, misalnya, Julius Gould dan W. L. Kold.*Dictionary of Social Sciences*.New York: UNESCO. Hlm. 242.

sosialnya, terutama bagi mereka yang telah memperoleh jabatan dalam pemerintahan.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sutherland, bahwa pada awal abad XX ini, di kota-kota Hindia Belanda muncul suatu unsur baru dalam masyarakat pribumi, yaitu lapisan cendekiawan. Walaupun golongan ini pada umumnya berasal dari lingkungan priyayi, namun mereka telah keluar dari kerangka pangreh praja, dan setidak-tidaknya sampai batas tertentu keluar dari kultur tradisional. Mereka hidup di perbatasan antara masyarakat pribumi dan masyarakat kolonial, bekerja di dalam lembaga-lembaga yang sedang tumbuh dari kalangan kehidupan pribumi kelas menengah, sebagai guru-guru atau wartawan, dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain serta dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Orang-orang ini tidak lagi merasa senang menduduki tempat yang telah disediakan baginya dan yang telah mapan di masyarakat Hindia Belanda. Mereka memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, sarana-sarana penunjang baru,

gagasan-gagasan baru, dan informasi-informasi baru.⁹

Jelas, arah yang ditunjukkan Sutherland adalah bahwa kaum cendekiawan di sini menempati kedudukan menengah jika ditinjau dari posisi mereka. Di sisi lain, tampaknya mereka juga menduduki posisi menengah jika ditinjau dari kesejahteraan sosial, karena secara ekonomi pendapatan mereka dapat dikatakan lebih dari cukup. Jadi, dari segi status sosialnya mereka termasuk golongan priyayi, tetapi dari segi kelas sosial mereka termasuk kelas menengah. Dengan demikian, baik golongan pengusaha maupun kaum cendekiawan, keduanya dapat digolongkan sebagai golongan menengah. Ditambahkan bahwa golongan menengah sebagai fenomena yang muncul pada abad ke-20 adalah kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa, pemimpin surat kabar, kaum pengusaha dan pedagang pribumi, ahli hukum dan

9 Heather Sutherland. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 114.

kelompok-kelompok profesional yang lain.¹⁰

Kemunculan kedua golongan ini memang sedikit banyak berkaitan erat dengan pemberlakuan Politik Etis. Walaupun Politik Etis itu sendiri pada dasarnya mengarah pada kepentingan kolonial, tetapi secara tidak langsung mendukung kemunculan kedua golongan tersebut. Wertheim, misalnya, mengungkapkan bahwa pemberlakuan Politik Etis dalam bidang irigasi ternyata memberi keuntungan bagi perkebunan tebu yang jumlahnya sebanyak populasi pertanian. Pelayanan kesehatan, sebagian berkaitan erat dengan kebutuhan dari berbagai perusahaan akan tenaga kerja yang secara fisik baik.

Perjuangan melawan penyakit-penyakit berat, seperti penyakit pes dan kolera merupakan akibat langsung dari bisnis Barat. Sepanjang berkaitan dengan pengajaran dasar dari sekolah desa

10 Farchan Bulkin. "Kapitalisme, Golongan Menengah, dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian. *Prisma 2*, Februari 1984. Hlm. 6.

dan pendidikan model Barat, materi yang diberikan adalah sekitar pelatihan untuk personel administratif dalam badan-badan pemerintahan. Selanjutnya, dalam bidang industri terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan, sedangkan lalu lintas kereta api yang dilengkapi dengan bengkel-bengkel perakitan yang membuat mesin adalah untuk mendukung pabrik-pabrik gula.¹¹ Namun, yang perlu diketahui bahwa terutama dalam bidang pendidikan yang mereka programkan, ternyata banyak membentuk golongan intelektual. Begitu pula penyediaan alat transportasi yang pada dasarnya untuk mendukung industri perkebunan, ternyata secara tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian kota, seperti industri batik, sehingga banyak memunculkan pengusaha sukses.

Jadi, bagaimanapun bentuk dan tujuannya, pada kenyataannya

11 W. F. Wertheim. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta : Tiara Wacana. Hlm. 76-77.

pemberlakuan Politik Etis mempengaruhi kemajuan perekonomian kota di wilayah Hindia Belanda pada umumnya. Misalnya di kota Surakarta, bahwa kemunculan golongan menengah pribumi atau pedagang kelas menengah yang erat kaitannya dengan dunia perbatikan di kota ini, perkembangan dan kemajuan mereka tidak terlepas dari pengaruh Industrialisasi perkebunan. Dalam hal ini, penyediaan alat-alat transportasi, seperti kereta yang pada akhir abad ke-19 ini sudah menghubungkan kota-kota di seluruh Jawa, secara tidak langsung telah mendukung meluasnya pasaran batik kota Surakarta ini. Pada prakteknya, perkembangan alat transportasi ternyata tidak hanya memudahkan arus lalu lintas import bahan baku, tetapi juga memperluas jaringan pemasaran batik.¹²

Demikian pula jika melihat fenomena yang terdapat di kota Mojokuto. Geertz menyebutkan bahwa pada tahun 1925 di kota

Mojokuto ini telah berkembang dengan pesat, yaitu menjadi kota dagang yang makmur, berkat kegiatan-kegiatan Belanda yang secara besar-besaran mengusahakan pertanian perdagangan, terutama tebu di pedesaan sekitarnya. Pada tahun tersebut, di daerah sekitar kota Mojokuto dengan jari-jari tiga puluh kilometer telah terdapat sepuluh pabrik gula, tiga pabrik tapioka, dan dua pabrik sisal. Pada tahun itu pula, terdapat tujuh jalur jalur kereta api menuju ke berbagai pabrik, dan volume barang angkutan antara tahun 1900 dan 1929 meningkat 4.000 persen. Segala macam perdagangan maju pesat, dan bahkan di kalangan penduduk Indonesia, misalnya perdagangan tekstil, tembakau, dan ikan asin berkembang dengan pesat. Rumah makan, toko barang-barang besi, dan toko kelontong pun muncul di mana-mana.¹³ Kondisi yang semacam inilah yang mengakibatkan banyak

12 Takashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak; Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912-1926*. Terj. Hilmar Farid. Jakarta: Grafiti. Hlm.36.

13 Clifford Geertz. 1977. *Penjaja dan Raja; Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomidi Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hlm. 9.

muncul golongan menengah dari kalangan pengusaha.

Kuntowijoyo juga menyebutkan bahwa golongan menengah juga muncul di beberapa kota santri di Jawa yang terkenal dengan kaum sebagai pusat perdagangan dan industri. Lebih lanjut di sebutkan bahwa Pusat-pusat kaum santri ini memperoleh pujian dalam dokumen tahun 1909 karena memiliki semangat dagang bangsa pertengahan atau kelas menengah yang menggeluti bidang perniagaan. Tempat-tempat tersebut adalah Kotagede di Yogyakarta, Laweyan di Surakarta, dan Kauman di Kudus.¹⁴ Contoh lainnya adalah Pekajangan, sebuah desa di kota Pekalongan, yang dalam dasawarsa ketiga abad ke XX, berganti rupa dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat komersil dan industri, sehingga masyarakatnya layak di sebut dengan kelas menengah. Sementara itu, pabrik manufakturing dan pencilupan menjadi mata

pencarian pokok penduduk¹⁵ kelas menengah di kota ini. Jadi, itulah gambaran fenomena awal abad ke-20 di wilayah Hindia Belanda.

D. Krisis Ekonomi Tahun 1930-an dan Peran Kelas Menengah

Telah di sebutkan bahwa tahun 1930 merupakan puncak terjadinya krisis ekonomi yang bersekala internasional. Tentu saja, bagi wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sangat terpuuk dengan adanya krisis tersebut, karena banyak produksi yang berorientasi ekspor sangat rentan terhadap siklus perdagangan. Diketahui bahwa Indonesia adalah wilayah yang bersifat agraris dan pada waktu itu termasuk wilayah yang perekonomian utamanya didasarkan pada pengekspor bahan-bahan mentah, di samping itu juga merupakan negara debitur (pengutang), sehingga ketika terjadi krisis ekonomi, maka relatif lebih sensitif terhadap kemerosotan ekonomi dibanding negara-negara lain yang berada dalam kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, di

15*ibid.* Hlm. 39.

14 Kuntowijoyo. 1985. "Muslim Kelas Menengah*Op. cit.* Hlm. 37.

Indonesia pada saat itu harga-harga produk ekspor jatuh secara drastis, melebihi dari harga barang-barang yang diimpor. Akibatnya, perbandingan harga-harga barang impor dan ekspor tidaklahimbang.¹⁶

Sementara itu, untuk mengatasi guncangan depresi ekonomi ini, timbullah berbagai strategi untuk keluar dari kesulitan ekonomi, baik dari pihak pemerintah maupun dari berbagai perusahaan. Salah satu strategi itu, misalnya, apa yang terkenal dengan *bezuiniging* (penghematan) anggaran pemerintah atau disebut juga dengan efisiensi. Tentu saja, kebijakan semacam ini merupakan kebijakan yang berat sebelah, sehingga semakin menambah kesengsaraan, terutama bagi masyarakat kecil. Hal semacam itu terjadi, karena setelah pemerintah mengambil kebijakan *bezuiniging*, berdampak pada adanya pengurangan anggaran belanja

(*begrooting*), sehingga banyak para pegawai pemerintah yang mengalami penurunan gaji atau bahkan diberhentikan. Demikian pula di pihak perusahaan perkebuan, mereka memberlakukan pemotongan gaji para buruh atau memberhentikan mereka dengan alasan efisiensi. Sebagaimana dilaporkan bahwa pemberlakuan pemotongan anggaran yang lebih ketat dilakukan oleh Menteri Urusan Tanah Jajahan, De Graff, dan terutama oleh penggantinya Colijn. Sementara itu, akibat dari pemotongan anggaran ini lebih lanjut akan menjadi bencana politik, ekonomi dan sosial.¹⁷

Di sisi lain, Ricklefs menyebutkan bahwa dampak krisis tahun 1930-an ini terhadap bangsa Indonesia jelas sangat serius. Para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidup, namun banyak juga di antara mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sebagian lahan yang tidak lagi digunakan untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi, tetapi sayangnya peningkatan produksi padi tidak

16 Ge Prince. "Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942". Dalam J. Thomas Lindblad (ed.). 1998. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 241.

17 *ibid.* Hlm. 243.

sepenuhnya dapat menyediakan keperluan makanan dan pekerjaan bagi populasi yang terus menerus bertambah. Kenyataannya, ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934. Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa setidaknya hingga akhir tahun 1930-an, kesejahteraan rakyat Indonesia menurun. Baru tahun 1937, dapat dikatakan pendapatan per kapita mungkin telah meningkat seperti tahun 1929.¹⁸

Namun, perlu ditekankan bahwa pada dasarnya baik tahun 1930-an ataupun tahun-tahun sebelumnya sebenarnya rakyat Indonesia tidak dapat berharap banyak kepada pemerintah Belanda, karena kesengsaraan selalu diterima rakyat pada umumnya. Apalagi tahun 1930-an, tidak ada alasan untuk optimis bagi rakyat Indonesia baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Misalnya dalam bidang politik, pemerintahan Belanda

menentang semua bentuk nasionalisme dan juga tidak ingin melihat Volksraad memainkan peranan penting. Rapat-rapat politik orang Indonesia sering kali dibubarkan oleh pihak polisi dan para pembicaranya ditangkap. Dalam lingkungan seperti ini, tidak mengherankan apabila nasionalisme hanya mendapat sedikit kemajuan.¹⁹ Itulah gambaran umum kondisi ekonomi, sosial maupun politik yang terjadi pada tahun 1930-an.

Kemudian, di mana posisi golongan menengah dan bagaimana gerakan-gerakan mereka yang tengah tumbuh dan berlangsung itu? Di sini perlu ditegaskan bahwa dengan terjadinya depresi ekonomi ini mereka sadar bahwa rasa persatuan atau nasionalisme yang tengah tumbuh ini perlu ditingkatkan. Mereka berfikir bagaimana kesulitan ekonomi masyarakat ini dapat teratasi. Oleh karena itu, tercetuslah di kalangan mereka untuk mengadakan gerakan-gerakan terutama di bidang ekonomi, sehingga pada saat itu tampak muncul kekuatan ekonomi baru.¹⁹*ibid.* Hlm.388.

18 M.C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terj.Satrio Wahono dkk.Jakarta: Serambi. Hlm.387.

Tampaknya, gerakan merekadalam bidang ekonomi pada kenyataannya memang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, yaitu struktur yang cenderung lebih tahan dari hantaman depresi ekonomi.

Ekonomi koperasi inilah yang salah satunya digalakan oleh kaum pergerakan untuk pengentasan kesulitan ekonomi akibat depresi ekonomi. Akibat adanya depresi ekonomi ini memang muncul di berbagai daerah jenis usaha koperasi, terutama yang diprakarsai oleh kaum pergerakan. Terkait dengan kesulitan ekonomi saat ini, Hatta sebagai salah satu tokoh pergerakan juga pernah menyarankan dalam *Daulat Rakjat* bahwa

“Sekarang kewadjiban kita : meluaskan lingkungan dasar (tolong-menolong) dan memperbaiki susunnja sampai tjotjok dengan dasar kemadjuan dan zaman. Misalnja dasar tolong-menolong itu sudah memeluk tjita-tjita koperasi. Akan tetepi koperasi jang tjotjok dengan kedaulatan rakjat ialah koperasi jang didirikan tidak semata-mata untuk mentjari untung, melainkan berusaha untuk membela kebutuhan orang banjak. Misalnja didirikan beberapa koperasi jang ini menolong lagi

timbulnja koperasi jang lain” (*Daulat Rakjat*, No. 37/38. tgl. 20/30-9-1932).²⁰

Di samping itu, munculnya usaha koprasia juga didukung oleh sejak dikeluarkan Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputra tahun 1927. Dilaporkan bahwa dengan ordonasi ini, maka pendirian dan untuk mendapatkan badan hukum kopersia ini memang lebih mudah, sehingga jumlah koperasi bertambah cepat sampai tahun 1932. Cepatnya pertambahan jumlah koperasi terutama didorong oleh Partai Nasional Indonesia yang menyelenggarakan Kongres Koperasi pada tahun 1929. Namun, yang utama adalah dilaporkan bahwa salah satu penyebab perkembangan koprasia adalah akibat sangat buruknya keadaan ekonomi dunia yaitu *maleise* (depresi ekonomi) yang juga melanda Indonesia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan pengeksport bahan baku untuk industri.²¹

20 Lihat Mohammad Hatta. 1953. *Kumpulan Karangan*. Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia. Hlm. 129.

Adapun, terkait dengan golongan menengah Muslim, Kuntowijoyo melaporkan bahwa pengelolaan toko-toko koperasi yang dilakukan secara rasional dalam dasawarsa ke dua abad XX ini, telah merintis jalan ke arah timbulnya gerakan koperasi di kalangan golongan menengah Muslim di tahun-tahun 1930-an, seperti usaha batik di Pekajangan, tahun 1934, Persatuan Pengusaha Pabrik Rokok Kretek di Kudus, tahun 1937. Setelah itu, menyusul pembentukan usaha koperasi pembuatan batik di Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan, yang semuanya dikuasai oleh pengusaha kaum santri.²² Demikian pula, di tahun 1930, NU (Nahdlatul Ulama), mendirikan Lajnah Waqfiyah atau Panitia Wakaf yang mengelola keuangan pesantren

21 Eddiwan. "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Indonesia". Dalam Sri Edi Swasono (ed.). 1987. *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press. Hlm. 130-131.

22 Kuntowijoyo. *Op. cit.*. Hlm. 40.

dan melakukan kegiatan usaha atas nama pesantren. Pada tahun 1937, organisasi yang sama mendirikan koperasi yang kemudian menjadi importir barang buatan Jepang dengan nama Syirkah Mu"awamah.²³

Memang, bahwa sekitar tahun 1930, sebagaimana dilaporkan Burger, merupakan awal kebangunan Industri rakyat, yang setengah abad sebelumnya hal itu tidaklah mungkin terjadi. Sementara itu, lambat laun peredaran uang bertambah maju dan rakyat pun banyak berhasil untuk menyesuaikan diri dengan rumah tangga uang, sehingga bangsa Indonesia lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan ekonomi modern dengan jalan lebih banyak membuka perusahaan sendiri.²⁴

Suatu hal yang menarik, bahwa untuk menyikapi kondisi krisis ekonomi ini, banyak usaha yang dilakukan kaum terpelajar untuk mendirikan kursus-kursus tenun, bank-bank, koperasi-koperasi, *23Ibid.* Hlm.41.

24 D. H. Burger. *Op. cit.*.Hlm. 193-194.

dan sebagainya. Usaha dari kaum terpelajar ini dimungkinkan karena timbulnya keyakinan untuk memajukan rakyat dan karena menghadapi kenyataan yang ada. Misalnya, suatu perkumpulan yang dinamakan *Studieclub*, yang cabangnya terdapat di kota-kota besar dan kemudian menjelma menjadi PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) telah banyak usaha dalam lapangan ini. Usahanya juga terlihat dalam lapangan pertanian, kerajinan rakyat, dan perdagangan. Namun, dikarenakan modalnya sangat kecil, maka jalan yang ditempuh adalah koperasi,²⁵ sehingga usaha koprasi ini mewarnai struktur perekonomian pada masa kesulitan ekonomi ini dan bahkan bertambah maju setelah adanya perubahan peraturan tentang koperasi pada tanggal 1 April 1933.²⁶

Memang, dalam catatan sejarah, tahun 1930-an terkenal dengan tahun munculnya apa yang

25 Soedjito Sosorodihardjo. 1968. *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa; Suatu Analisis*. Jogjakarta: Karya SEKIP. Hlm. 30.

26 Staatblad 33: 108.

dikenal, sebagaimana yang disebutkan Furnivall, dengan industri manufaktur (kerajinan) lokal. Hal ini terjadi, kemungkinan akibat reaksi dari adanya depresi ekonomi, sehingga dengan segera muncul produksi kerajinan lokal. Kondisi yang semacam ini juga yang ditanggapi oleh kaum pergerakan untuk memunculkan gerakan *swadesi* yang kemudian juga menjadi faktor yang mendorong munculnya produksi manufaktur pribumi.²⁷

Hal serupa juga disinggung oleh Wertheim, bahwa selama masa depresi, sejumlah petani kehilangan tanah mereka dan dipaksa untuk mencari sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, muncullah industri pemintalan. Walaupun industri semacam ini merupakan produk dari keadaan yang memaksa, tetapi perlu dicatat bahwa hal ini memberikan kondisi tenaga kerja yang relatif lebih baik.²⁸

27 J. S. Furnivall. 1967. *NetherlandsIndia : A Study of Plural Economy*. Cambridge: The University Press. Hlm. 433.

Soeroto juga menyebutkan bahwa masa antara 1930-1942 dapat dianggap sebagai masa perkembangan kerajinan yang sebenarnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari timbulnya krisis ekonomi baru yang dikenal dengan nama "malaise" pada awal tahun 1930-an. Kondisi inilah yang memunculkan gagasan untuk menjadikan sektor kerajinan sebagai "dewa penolong" krisis yang sedang melanda perekonomian Indonesia. Terbukti bahwa sektor kerajinan ini mampu menampung tenaga kerja yang menganggur dan menjadi sumber penghasilan di luar sektor pertanian.²⁹

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fenomena yang muncul

28 W.F. Wertheim. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi; Studi Perubahan Sosial*. Terj. Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 213.

29 Soeri Soeroto. "Sejarah Kerajinan di Indonesia". *Prisma*, 18 Agustus 1983. Hlm. 25-26.

yang mewarnai sejarah awal abad ke-20 di kebanyakan wilayah Hindia Belanda ini. Fenomena tersebut adalah munculnya golongan pengusaha menengah yang terkait industrialisasi, munculnya golongan intelektual baru yang terkait dengan semakin diperluasnya kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan Barat, dan adanya perubahan struktur ekonomi dengan melamahnya sektor formal yaitu perkebunan dan menguatnya sektor non formal, yaitu munculnya industri manufaktur yang terkait dengan hantaman depresi ekonomi tahun 1930-an. Selanjutnya, penting untuk ditegaskan bahwa golongan menengah baik dari kalangan pengusaha maupun intelektual dapat disebut sebagai pahlawan bagi masyarakat pribumi secara umum. Merekalah yang banyak berjasa untuk meringankan penderitaan rakyat baik akibat adanya penjajahan secara umum maupun dari kesengsaraan akibat depresi tahun 1930-an.

F. Daftar Pustaka

Burger, D. H.. 1960. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Terj.

- Atmosudirdjo. Djakarta: Pradnya Pramita.
- Clifford Geertz. 1977. *Penjaja dan Raja; Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomidi Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Eddiwan. "Beberapa Catatan Mengenai Perkoperasian Indonesia". Dalam Sri Edi Swasono (ed.). 1987. *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Farchan Bulkin. "Kapitalisme, Golongan Menengah, dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian". *Prisma* 2, Februari 1984.
- Furnivall, J. S.. 1967. *Netherlands India : A Study of Plural Economy*. Cambridge: The University Press.
- Ge Prince. "Kebijakan Ekonomi di Indonesia, 1900-1942". Dalam J. Thomas Lindblad (ed.). 1998. *Sejarah Ekonomi Moderen Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Heather Sutherland. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan.
- Julius Gould dan W. L. Kold. *Dictionary of Social Sciences*. New York: UNESCO. Kuntowijoyo. 1985. "Muslim Kelas Menengah Indonesia dalam Mencari Identitas, 1910-1950". *Prisma* 11.
- Laeyendeker, L. 1991. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Terj. Samekto S. S.. Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Hatta. 1953. *Kumpulan Karangan*. Djakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Ricklefs, M.C.. 2005. *Sejarah Indonesia Moderen 1200-2004*. Terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi.
- Sartono Kartodirdjo. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: Gramedia. Soedjito Sosorodihardjo. 1968. *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa; Suatu Analisis*. Jogjakarta: Karya SEKIP.
- Soeri Soeroto. "Sejarah Kerajinan di Indonesia". *Prisma*, 18 Agustus 1983.

Takashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak; Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912-1926*. Terj. Hilmar Farid. Jakarta: Grafiti.

Van Der Kroef, J.M.. 1954. *Indonesia in The Modern World*. Bandung: Masa Baru.

Wertheim, W. F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*, Terj. Misbah Zulfa Ellizabet. Yogyakarta : Tiara Wacana

